

LAPORAN KEMAJUAN TIMOR TIMUR

April 2000



**Peemerintahan Transisi
Perserikatan Bangsa Bangsa di
Timor Timur**

Kantor Komunikasi dan Informasi Umum
Bukan dokumen resmi. Untuk tujuan informasi saja.

Adftar Isi

- **Pendahuluan.....1**
- **Situasi Kemanusiaan2**
 - ✓ *Pemulangan Pengungsi*
 - ✓ *Pembagian Bahan Makanan*
 - ✓ *Perumahan*
- **Infrastruktur3**
 - ✓ *Pelayanan Pos*
 - ✓ *Angkutan Udara*
- **Pelayanan Sosial4**
 - ✓ *Pendidikan*
 - ✓ *Kesehatan*
- **Lembaga Pengembangan.....4**
 - ✓ *Administrasi Umum*
 - ✓ *Pengendalian Perbatasan*
- **Perkembangan Media5**
- **Pembangunan Ekonomi6**
 - ✓ *Buruh*
 - ✓ *Sektor Swasta*
 - ✓ *Pertanian dan Perkebunan*
- **Penegakan Hukum8**
 - ✓ *Hakim*
 - ✓ *Polisi Sipil*
 - ✓ *Tugas Polisi Timor Timur*
 - ✓ *Kelompok Bantuan Polisi*
 - ✓ *Sistem Penjara*
- **Hak Asasi Manusia10**
- **Perdamaian Dan Keamanan10**
 - ✓ *Situasi Keamanan*
- **Dana Kerpercayaan11**
 - ✓ *Dana Kerpercayaan UNTAET*
 - ✓ *Berbagai Dana Kepercayaan Bank Dunia*

**AKRONIM YANG DIGUNAKAN
DALAM EDISI INI**

ADB	Asian Development Bank
AusAID	Lembaga Australia untuk Pengembangan Internasional
CARE	CARE International
CIVPOL	Polisi Sipil PBB
CNRT	Dewan Perlawanan Nasional Timor Timur
FAO	Organisasi Pangan dan Pertanian
GOAL	GOAL Irlandia
GPA	Pelayanan dan Administrasi Umum
ICRC	Komite Palang Merah Internasional
JICA	Japan International Cooperation Agency
ILO	Organisasi Buruh Internasional
NCC	Dewan Penasehat Nasional
PKF	Pasukan Perdamaian PBB
SRSG	Wakil Khusus Sekretaris Jenderal
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UHP	Pilar Kemanusiaan UNTAET
UNDP	Pengembangan Program Perserikatan Bangsa Bangsa
UNESCO	Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya Perserikatan Bangsa Bangsa

UNHCR	Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa
UNICEF	Dana untuk Anak-anak Perserikatan Bangsa Bangsa
UNMO	Pengamat Militer PBB
UNTAET	Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa Bangsa di Timor Timur
USAID	Lembaga Amerika Serikat untuk Pengembangan Internasional
WFP	Program Pangan Dunia
WHO	Badan Kesehatan Dunia

Edisi ini diterbitkan oleh Kantor Komunikasi dan Informasi Umum (OCPI) bekerjasama dengan Unit Koordinasi Donor. Informasi dalam edisi ini adalah laporan kemajuan sejak 15 April 2000.

PENDAHULUAN

Dalam waktu enam bulan sejak terbentuknya UNTAET pada tanggal 25 Oktober 1999, telah dikeluarkan sebanyak 17 peraturan; pajak telah dikumpulkan; akademi kepolisian kini melatih angkatan kadetnya yang pertama; komisi dinas sipil secara berkala mengadakan pertemuan; 4000 orang kini aktif sebagai pegawai negeri Timor Timur; sidang pengadilan pertama diharapkan akan dimulai pada akhir Mei; lebih dari 160 mayat telah digali kembali. Instansi kesehatan interim telah didirikan dan dewasa ini mengkoordinir perawatan kesehatan di lebih dari 40 klinik di Timor Timur. Sekitar 90% penduduk usia sekolah yang duduk di sekolah dasar pada bulan Agustus 1999 telah kembali ke kelas. Pasokan listrik telah dipulihkan dan kini mencapai sekitar 85% dari kapasitas dalam keadaan pasca jajak pendapat; dan penyediaan air kini kembali melayani seluruh 13 wilayah Timor Timur.

Salah satu prioritas utama UNTAET dalam enam bulan mendatang adalah untuk memperkuat mekanisme-mekanisme konsultatif dan partisipasi masyarakat Timor Timur pada semua tingkatan. Dewan Penasehat Wilayah telah dibentuk dan keputusan telah diambil untuk mengangkat warga Timor Timur sebagai Wakil Administrator dan Wakil Kepala Departemen. UNTAET akan bekerja untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan dengan Dinas Sipil Timor Timur sesuai dengan perkembangan dinas tersebut. Bidang prioritas lainnya adalah penyerapan tenaga kerja. UNTAET akan membuka Pusat-Pusat Pelayanan Tenaga Kerja di sebagian besar ibu kota wilayah. Sebuah proyek Bank Dunia yang bertujuan untuk memajukan sektor swasta di Timor Timur telah dimulai dan berbagai proyek rekonstruksi skala besar diharapkan akan dimulai beberapa bulan mendatang. Perhatian utama UNTAET juga akan terarah untuk membantu meluncurkan proses konstitusi di Timor Timur. Misi PBB ini juga akan menumbuhkan perhatian kepada upaya untuk mengurangi jumlah Pasukan Pemelihara Perdamaian jika keamanan sekarang ini dapat dipertahankan dan dengan ditingkatkannya kekuatan polisi sipil. Misi PBB ini akan bekerjasama dengan

masyarakat Timor Timur untuk menentukan ukuran-ukuran bagi penarikan UNTAET dikemudian hari.

Dalam periode ini, situasi keamanan di Timor Timur tetap stabil dan dibawah kendali. Insiden-insiden yang terjadi lebih terkait dengan masalah sosial dan ekonomi dibandingkan dengan masalah keamanan.

Untuk lebih melibatkan masyarakat Timor Timur dalam pengelolaan negeri mereka, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Sergio Vierra de Mello, telah menginstruksikan pembentukan Dewan Penasehat Wilayah dengan partisipasi wakil-wakil partai politik, gereja, kelompok wanita dan pemuda.

Sejalan dengan ini adalah prakarsa untuk mengangkat Wakil Administrator Wilayah dan Wakil Kepala Departemen dari kalangan masyarakat Timor Timur. Pengangkatan ini akan dilakukan melalui Komisi Pelayanan Umum (Public Service Commission), yang baru dibentuk pada 24 Maret dan dibebani tanggung jawab untuk memilih calon pegawai negeri.

Sebuah tim terdiri atas sembilan wakil LSM Timor Timur yang ditugaskan oleh UNTAET kini sedang melakukan evaluasi keefektifan proyek-proyek bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh badan-badan bantuan internasional di Timor Timur. Atas dasar dua buah sampel, Manatuto dan Suai, evaluasi akan dilakukan terhadap proyek yang telah memberikan perlindungan (shelter), jasa kesehatan dan bantuan makanan. UNTAET juga bermaksud untuk meninjau keefektifan bantuan tersebut dari kaca mata penerimanya. Evaluasi ini dimulai pertengahan April dan sebuah laporan akhir akan disusun menjelang akhir bulan Mei. Laporan tersebut akan digunakan oleh UNTAET pada Konperensi Lisabon yang akan diadakan pada bulan Juni.

Selain melakukan perjalanan di Timor Timur, Wakil Khusus Sekjen PBB tersebut juga berkunjung ke Indonesia pada akhir Maret untuk membicarakan kerjasama bilateral antara Indonesia dan UNTAET. Topik-topik yang dibahas berkisar dari kerjasama bilateral mengenai isu-isu

perbatasan, pendidikan dan pensiun hingga masalah-masalah peradilan. Wakil Khusus Sekjen PBB tersebut juga memberikan penjelasan kepada duta besar negara-negara donor tentang situasi di Timor Timur.

Wakil Khusus Sekjen PBB itu berkunjung ke Jepang, Cina dan Kuala Lumpur pada bulan April dimana ia telah meninjau kembali strategi dan kebutuhan UNTAET untuk bulan-bulan mendatang, mengingat akan diselenggarakannya Konferensi Negara Donor di Lisbon.

Sebuah kantor penghubung UNTAET telah dibuka di Kupang untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi politik dan kembalinya pengungsi ke Timor Timur.

Peringatan pertama pembantaian di gereja di Liquica ditandai dengan dilangsungkannya misa oleh Uskup Carlos Bello. Pada 6 April 1999, anggota milisi Besi Merah Putih menyerang halaman gereja tersebut dimana ratusan penduduk telah mencari perlindungan setelah anggota milisi itu membunuh lima orang di pinggiran kota Liquica sehari sebelumnya. Semua keluarga yang bersembunyi di gereja itu diperlakukan dengan kasar- laki-laki, wanita dan anak-anak –dengan senjata api, kapak dan pisau. Jumlah pasti mereka yang terbunuh belum bisa dipastikan meskipun Gereja Katolik telah memberikan daftar 61 nama. Menurut saksi mata korban pembantaian itu mencapai hampir 200 orang. Sejauh ini, 23 mayat dari pembantaian tersebut telah digali kembali.

SITUASI KEMANUSIAAN

□ Pemulangan Pengungsi

Jumlah pengungsi yang kembali meningkat dalam periode waktu ini termasuk jumlah mantan anggota TNI dan keluarga mereka yang berada di antara pengungsi-pengungsi yang kembali tersebut.

Kelompok terbesar mantan pimpinan-pimpinan TNI yang kembali sejauh ini telah menuju ke Aileu. Perundingan yang berlangsung lama dengan UNHCR, UNTAET, CNRT, Gereja dan Falintil telah berlangsung sebelumnya untuk memastikan jaminan keamanan bagi mereka yang

kembali. Ini adalah bagian dari program rekonsiliasi dimana anggota milisi yang kembali yang tidak melakukan tindakan kriminal yang serius, kini sedang melalui proses reintegrasi agar diterima kembali oleh lingkungan tempat tinggal mereka. Kegiatan-kegiatan reintegrasi ini meliputi semacam pelayanan masyarakat disusul dengan pertemuan lingkungan dimana masyarakat menentukan apakah untuk menerima kembali anggota milisi ke dalam masyarakat mereka.

Menjelang akhir April, lebih dari 160 000 orang pengungsi telah kembali. Sebagian besar kepulauan pengungsi ini dikelola oleh UNHCR dan IOM.

Menurut UNHCR, sekitar 100 000 pengungsi masih berada di kamp-kamp di Timor Barat.

Suatu kampanye disinformasi yang berlangsung di kamp-kamp tersebut telah diidentifikasi sebagai alasan utama mengapa sebagian pengungsi merasa tidak aman untuk kembali. UNHCR dan berbagai organisasi lainnya telah mengembangkan bahan informasi massa dalam upaya untuk mengatasi kampanye disinformasi tersebut. Salah satu upaya terbaru adalah rekaman video yang dibuat oleh Jesuit Refugee Service yang menyorot aspek-aspek positif dari pengalaman repatriasi dan situasi umum di Timor Timur.

Dengan semakin dekatnya batas waktu 31 Maret yang diumumkan oleh Pemerintah Indonesia, pihak berwenang di Jakarta memberikan indikasi mereka akan memberikan pengungsi yang tinggal di kamp-kamp di Timor Barat tambahan waktu tiga bulan untuk menentukan apakah mereka ingin tinggal di Timor Barat atau ingin kembali ke Timor Timur. UNHCR juga memperoleh indikasi bahwa Indonesia tidak akan menghentikan dukungannya kepada kamp-kamp pengungsi tersebut.

Sementara itu, pertemuan keluarga yang telah menyatu kembali dan tinggal di bagian yang berbeda-beda di sepanjang daerah perbatasan antara Timor Timur dan Timor Barat terus berlangsung di Batugade dan Oecussi. Wakil Khusus Sekretaris Jenderal

menyertai penyatuan kembali keluarga di Batugade dimana ia telah menemui masyarakat Timor Timur yang tinggal di kamp-kamp di Timor Barat.

□ *Pembangian Bahan Makanan*

Kampanye pendistribusian makanan yang menargetkan kelompok-kelompok rentan perlu diteruskan hingga tahun 2001, menurut Program Pangan Dunia (World Food Program - WFP). Bersama dengan Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization - FAO), WFP telah menyelesaikan evaluasi bersama makanan dan tanaman di seluruh Timor Timur. Menurut penemuan tahap awal, panen jagung kemungkinan akan lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena petani baru mengerjakan lahan mereka pada ujung musim tanam. Hal ini terjadi terutama di kawasan bagian barat, Covalima, Bobonaro dan Ambeno.

Evaluasi FAO-WFP tersebut juga mencatat sejumlah kasus malnutrisi yang dilaporkan di kalangan anak-anak di bawah usia 5 tahun, akibat praktek pemberian makan yang tidak tepat di daerah pedesaan yang menunjukkan perlunya diadakan kampanye pendidikan gizi dasar.

□ *Perumahan*

Ditribusi perangkat tempat berlindung UNHCR kini sedang berlangsung di 12 dari 13 wilayah dimana Covalima dan Bobonaro merupakan wilayah paling baru yang menerima perangkat tersebut.

Menjelang akhir April, sebanyak 13.000 perangkat bagi pembuatan tempat berlindung itu tiba di Timor Timur. Dari jumlah ini sebanyak 7.385 telah didistribusikan dan 2.788 keluarga yang menerimanya telah selesai membangun tempat tinggal mereka.

INFRASTRUKTUR

Pada 24 April Bank Pembangunan Asia telah mengumumkan persetujuan perjanjian hibah senilai hampir AS\$30 juta di bawah Dana Perwalian Yang dikelola Bank Dunia untuk membangun kembali infrastruktur

Timor Timur. Dana tersebut akan dialokasikan dalam dua tahun mendatang untuk pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan dan perbaikan dan perawatan sarana listrik.

Sekitar AS\$7,5 juta akan diperuntukkan untuk proyek pembangunan kembali jaringan listrik.

Sebanyak AS\$20 juta lagi akan digunakan untuk perbaikan jalan darurat. Pekerjaan perbaikan ini diperkirakan akan menyerap sekitar 750 tenaga kerja dalam 12 bulan mendatang. Kontrak untuk perbaikan jalan ini akan diserahkan bulan Mei mendatang.

Persetujuan tersebut juga mengalokasikan dana sebesar AS\$2,2 juta untuk pembangunan kembali dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan.

□ *Pelayanan Pos*

Dinas Pos Timor Timur yang baru diresmikan pada 29 April menyediakan jasa pelayanan kiriman surat internasional melalui Darwin dan jasa pengiriman surat dalam negeri antara Dili dan Baucau. Perangko polos yang dijual dengan harga AS\$0.50 sen untuk pengiriman surat internasional dan AS\$0.10 sen untuk pelayanan pengiriman surat dalam negeri. Sebanyak dua ratus ribu perangko (100.000 perangko domestik dan 100.000 internasional) didesain dan dicetak di Portugal. Pemerintah Portugal juga telah membantu upaya rehabilitasi bangunan dan dengan penyediaan peralatan dan keahlian yang mencapai nilai A\$500.000.

Kantor Pos Pusat di Dili dibuka dari Senin hingga Kamis mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 dan dari pukul 08.00 hingga pukul 12.00 pada hari Sabtu. Kantor Pos Pusat ini ditutup pada hari Minggu dan hari libur umum.

□ *Angkutan Udara*

Qantas telah memulai penerbangan komersial antara Dili dan Darwin pada 2 Mei. Sebuah pesawat komersial melayani jasa penerbangan antara Dili dan Oecussi

dengan tarif ongkos pulang pergi sebesar AS\$190.

PELAYANAN SOSIAL

□ *Pendidikan*

Lebih dari 147.000 anak-anak kini belajar di sekolah-sekolah dasar di seluruh 13 wilayah Timor Timur.

Tidak tersedianya kurikulum standar dan kurangnya pelatihan bagi tenaga pengajar merupakan dua masalah utama dalam bidang pendidikan dasar.

Agar dapat memperbaiki kemampuan teknis para guru, mereka telah diwawancarai di seluruh 13 wilayah untuk mengidentifikasi calon guru yang akan menjalani kursus pelatihan guru yang direncanakan akan dimulai awal Mei. Sebanyak 30 guru dari masing-masing wilayah akan mengambil bagian dalam kursus pelatihan dua minggu tersebut. Pada akhir pelatihan itu, UNICEF dan OXFAM akan mengevaluasi hasil kursus pelatihan guru tersebut.

Dewasa ini persiapan sedang dilakukan untuk ujian nasional guru pada bulan Juni. Mereka yang lulus ujian ini akan memperoleh status penuh sebagai pegawai negeri.

Satuan Tugas Pemetaan Sekolah telah bertemu dengan insinyur-insinyur Timor Timur yang kini sedang mempersiapkan dimulainya inspeksi ronde kedua evaluasi kerusakan sekolah.

□ *Kesehatan*

Gudang pusat penyimpanan obat-obatan telah dibuka di Dili pada 6 April. Ini adalah hasil dari usaha bersama oleh Otorita Kesehatan Interim, UNICEF dan GOAL, sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional. Kiriman pertama obat-obatan senilai AS\$670.000 disumbang oleh badan bantuan Jepang, JICA. Gudang ini merupakan sarana sentral pertama milik administrasi Timor Timur yang baru tersebut, dan akan menjadi titik distribusi sentral obat-obatan di Timor Timur yang

akan memerlukan pasokan obat-obatan tahunan senilai sekitar AS\$2 juta. Untuk pertama kalinya sejak diadakan jajak pendapat, penyelenggara kesehatan akan dapat memesan obat-obatan yang diperlukan dalam suatu wilayah tertentu bukan paket obat-obatan umum yang didistribusikan di waktu lampau.

Suatu program kesehatan nasional tiga tahun telah direkomendasikan oleh misi kesehatan bersama yang dikepalai Bank Dunia dan mencakup wakil-wakil dari AusAID, Komisi Eropa, Portuguese Gulbenkian Foundation, dan UNTAET. Program ini terdiri atas tiga komponen: memulihkan akses kepada jasa pelayanan mendasar, mengembangkan kebijakan kesehatan (peraturan dan perundang-undangan) dan mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek tersebut, termasuk perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas kesehatan.

Program tersebut akan dilaksanakan dalam tiga tahap selama tiga tahun hingga 2002. Biayanya diperkirakan mencapai AS\$40 juta dan sebagian besar akan didanai oleh Dana Perwalian Timor Timur yang dikelola Bank Dunia dan Dana Perwalian UNTAET.

LEMBAGA PENGEMBANGAN

□ *Administrasi Umum*

Komisi Dinas Umum (Public Service Commission - PSC) telah diluncurkan pada 24 Maret lalu. Komisi ini adalah sebuah badan yang independen dengan sasaran utama untuk mengembangkan dinas sipil yang ramping dan efisien. Komisi ini mengawasi kegiatan administrasi Timor Timur dengan merumuskan kebijakan dan petunjuk umum yang berkaitan dengan rekrutmen, skala gaji dan hak serta kewajiban pegawai negeri. Komisi tersebut terdiri dari lima warga Timor Timur dan dua warga manca negara dan diketuai oleh Mariano Lopez, mantan direktur radio dan televisi di Timor Timur.

Dalam pertemuannya sejauh ini, PSC telah merekomendasikan bahwa calon pegawai negeri bekerja 40 jam seminggu dan mendapatkan 12 hari cuti tahunan.

Dalam upaya untuk menyampaikan informasi tentang pengembangan Dinas Sipil juga untuk membiasakan pegawai-pegawai senior dengan kebutuhan utama di tingkat lokal, serangkaian kunjungan ke wilayah-wilayah telah dimulai oleh Dinas Sipil dan Departemen Tenaga Kerja Umum dari GPA.

Akademi Dinas Sipil akan diresmikan pada 8 Mei dan pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil itu telah dimulai pada 24 April.

□ *Pengendalian Perbatasan*

Timorese Border Control Service (Dinas Pengendalian Perbatasan Timor Timur) akan memperluas operasinya dari Pelabuhan Udara Internasional dan Pelabuhan Batugade pada 1 Mei. Selanjutnya berbagai kegiatan direncanakan dimulai di Salele dan Oecussi. Sebanyak 18 petugas Dinas Perbatasan telah menyelesaikan kursus pelatihan dasar dan kini telah dipekerjakan di Stasiun Kendali Perbatasan di Batugede dan Salele. Sebanyak 10 petugas duane dan imigrasi Portugal dipekerjakan di Pelabuhan Udara Dili dan Pelabuhan Dili untuk membantu tugas pengendalian perbatasan dan pelatihan staf bersama lima warga Selandia Baru dan enam petugas duane Australia yang tiba lebih awal. Kanada telah menyumbang 11 kendaraan segala medan untuk digunakan oleh Dinas Sipil Perbatasan.

Menjelang akhir April, Dinas Kendali Perbatasan (Border Control Service) telah mengumpulkan pajak senilai AS\$400.000, Pengumpulan pajak tersebut dimulai pada 20 Maret.

Suatu petunjuk untuk mengimpor barang ke Timor Timur untuk importir komersial dan importir swasta dan eksportir telah diterbitkan dan kini didistribusikan kepada umum.

PERKEMBANGAN MEDIA

Proyek konsortium percetakan telah mulai meningkatkan momentumnya. Setelah berbagai pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (lembaga swadaya masyarakat dan penerbit media) maka telah

dirumuskan serangkaian peraturan. Perbaikan infrastruktur di tempat-tempat percetakan telah selesai dilakukan, barang seperti kertas, tinta dan lain-lain telah dipesan, dan seorang insinyur telah didatangkan ke Dili untuk memperbaiki dan merenovasi percetakan-percetakan tersebut. Operator-operator percetakan terdahulu juga telah diidentifikasi.

Sementara sejumlah prakarsa pelatihan media yang bermanfaat telah diluncurkan di Dili dan di luar negeri, UNTAET juga telah mensponsori seorang konsultan dari Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) untuk membuat rekomendasi mengenai pengembangan kapasitas media (media capacity building) dan memperoleh masukan penuh dan langsung dari wartawan Timor Timur. Rekomendasinya itu akan meliputi saran-saran tentang cara-cara paling efektif untuk mendukung Persatuan Wartawan Timor Timur.

Atas permintaan UNTAET dan dengan dukungan UNESCO, sebuah misi ABU (Asia Pacific Broadcasting Union) mengunjungi Timor Timur untuk membuat rekomendasi tentang desain radio dan televisi di Timor Timur pada waktu yang akan datang. Laporan ABU tersebut diharapkan akan sangat berguna terutama bagi Otorita Siaran Independen dan Badan Siaran Umum Timor Timur. Badan Siaran tersebut diperkirakan akan didirikan sebagai kelanjutan dari suatu peraturan mengenai media siaran yang akan diajukan kepada Dewan Konsultatif Nasional pada bulan Mei.

Halaman gedung yang dulu ditempati oleh Radio Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai lokasi radio umum Timor Timur. Gedung tersebut kini digunakan oleh unit Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diperkirakan akan dikosongkan menjelang akhir Juni ketika kegiatan perbaikan dan renovasi akan dimulai.

Lospalos dan Maliana akan merupakan dua wilayah pertama yang akan memiliki stasiun radio masyarakat. Pelatihan staf dimulai pada akhir April lalu dan stasiun-stasiun radio tersebut diperkirakan akan mulai beroperasi pada pertengahan Mei. Pelatihan dan

peralatan disponsori oleh UNESCO dan dikelola oleh Kantor Komunikasi dan Informasi Umum UNTAET (Office of Communication and Public Information - OCPI) dan Administrator Wilayah di Lospalos dan Maliana. Wilayah-wilayah lain kemungkinan akan bergabung dengan proyek ini nanti.

✓ **Komunikasi UNTAET**

Menyusul dua kecelakaan fatal yang menewaskan dua orang bocah setelah granat yang sedang mereka mainkan meledak, maka Kantor Komunikasi dan Informasi Umum (OCPI) UNTAET telah mendesain dan akan mendistribusikan poster mengenai bahaya alat ledak beramunisi yang tidak meledak kepada sekolah-sekolah pada minggu kedua bulan Mei.

Suatu selebaran baru telah dibuat dan didistribusikan mengenai masalah penegakan hukum yang menjelaskan fungsi sistem peradilan dan tentang Polisi Sipil (Civ Pol).

Majalah video UNTAET yang pertama - suatu paket video satu jam dengan suguhan berita, tayangan khusus (feature) dan hiburan - telah didistribusikan pada 25 April ke semua wilayah. Sampai waktu siaran televisi tersedia (juga proyektor video layar besar), majalah video akan diperlihatkan kepada masyarakat melalui pesawat televisi yang disediakan oleh OCPI kepada seluruh Administrator Wilayah. Majalah video tersebut akan didistribusikan setiap minggu.

Radio UNTAET telah meningkatkan mutu program siarannya. Siaran Radio UNTAET kini mencakup program siaran langsung setiap hari Senin hingga Jumat pada pagi hari dan sekali lagi pada malam hari, dan produksi siaran yang telah direkam sebelumnya selama dua jam. Program berita dalam Bahasa Inggris dan Tetun diproduksi tiga kali sehari. Selain itu berbagai program mingguan diproduksi oleh kelompok-kelompok masyarakat madani mengenai isu gender, penegakan hukum, perburuhan, pemuda dan kesehatan masyarakat. Suatu program baru mengenai media diharapkan akan dimulai dalam minggu pertama bulan Mei (bertepatan dengan Hari Kebebasan

Pers Dunia) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Timor Timur.

Siaran Radio UNTAET kini mengelola siaran langsung dari Dili, dan program-program yang diaktifkan oleh komputer dari Baucau dan Maliana. Perbaikan bisa dan akan dilakukan di lokasi-lokasi ini untuk meningkatkan kapasitasnya. Tiga pemancar FM yang baru belum lama ini tiba dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brindisi dan lokasi-lokasi yang diprioritaskan untuk pemasangan pemancar tersebut adalah Suai, Oecussi dan Ermera.

Dengan ditingkatkannya kapasitas pemancar Radio UNTAET di Dili, maka hal ini memungkinkan dua stasiun radio di Timor Timur lainnya (Radio Falintil dan Radio Kmanek) untuk menggunakan pemancar di Dili tersebut untuk menyiarkan program mereka selain siaran-siaran reguler mereka yang memanfaatkan fasilitas mereka sendiri.

PEMBANGUNAN EKONOMI

□ **Buruh**

Sejak Januari, UNTAET, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta secara bersama telah membuka sekitar 25.000 kesempatan kerja baru. Agar upaya mencari kerja itu tidak begitu sulit bagi pelamar maupun calon majikan, UNTAET akan mendirikan Pusat Pelayanan Tenaga Kerja di seluruh 13 wilayah. Pusat Pelayanan Tenaga Kerja yang pertama akan dibuka pada 1 Mei di Dili.

Para pencari kerja bisa datang ke Pusat Pelayanan Tenaga Kerja tersebut dan menyampaikan kualifikasi dan pengalaman kerja mereka, melakukan wawancara dengan petugas dan dengan cara ini memungkinkan calon majikan untuk mengetahui tentang calon tenaga kerja yang tersedia. Selain itu di Pusat Pelayanan Tenaga Kerja, para pencari kerja juga bisa mengetahui tentang kesempatan kerja yang ada. Pusat-pusat tersebut akan ditangani staf dari warga Timor Timur. Kelompok pertama petugas Pusat tersebut akan selesai mengikuti pelatihan pada 28 April.

UNTAET, Bank Dunia dan UNDP pada 1 April lalu telah menandatangani sebuah proyek senilai AS\$499.000 untuk mempekerjakan 600 orang di Dili. Proyek ini akan terkonsentrasi pada upaya untuk membersihkan puing-puing dari jalan-jalan di kota Dili dan diperkirakan akan berjalan selama lima bulan. Suatu dinas pengelolaan limbah padat akan dikembangkan sebagai kelanjutan dari proyek tersebut.

✓ ***Proyek Berdampak Langsung (Quick Impact Project - QIP)***

Menjelang pertengahan April lalu, sebanyak 44 proyek QIP senilai AS\$497.000 telah disetujui berdasarkan Dana Perwalian UNTAET untuk QIP. Proyek-proyek ini akan memberikan pekerjaan kepada lebih dari 1.600 orang. OCHA dan UNHCR telah menyelenggarakan proyek senilai kurang lebih AS\$88.000. Proyek Berdampak Langsung 40 jam tersebut yang didanai oleh OCHA memberikan pekerjaan kepada 995 orang dan lima buah proyek UNHCR menyerap sekitar 130 orang tenaga kerja.

✓ ***Proyek Tenaga Kerja Transisional (Transitional Employment Project (TEP))***

Sebanyak 15.000 warga di seluruh Timor Timur diharapkan akan memperoleh pekerjaan jangka pendek melalui Proyek Tenaga Kerja Transisional. Proyek ini didanai oleh USAID (sekitar AS\$5 juta) dan didesain dan dilaksanakan oleh UNTAET. Sebuah Nota Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani pada 17 April oleh USAID dan UNTAET mengalokasikan AS\$100.000 untuk setiap wilayah untuk pembayaran gaji dan dana sebesar AS\$94.000 untuk perkakas dan peralatan yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek tersebut, juga peralatan olahraga.

TEP terutama membiayai kegiatan pembersihan seperti pembersihan kolam renang Dili, pengecatan katedral dan drainase umum dan pembersihan puing-puing di seluruh Timor Timur.

✓ ***Proyek Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Project - CEP)***

Alokasi dana pertama dari Proyek Pemberdayaan Masyarakat senilai AS\$21,5

juta di bawah Dana Perwalian untuk Timor Timur yang dikelola oleh Bank Dunia telah diserahkan kepada tiga sub wilayah di Liquica dalam minggu ketiga bulan April.

Setiap dewan desa (suco) yang baru dilantik tersebut telah mengidentifikasi proyek-proyek rehabilitasi yang akan dibiayai dengan uang tersebut. Nilai setiap proyek bisa mencapai AS\$5.600 dan meliputi pembangunan jalan menuju desa-desa terpencil, pembangunan pusat-pusat masyarakat yang dimusnahkan tahun lalu dan perbaikan saluran pipa air bersih.

Segera setelah dicairkannya dana tersebut, desa-desa itu memilih seorang pria dan seorang wanita dari dewan suco untuk mewakili desa mereka pada tingkat sub wilayah. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memulai siklus kedua dari proyek yang lebih besar berdasarkan proposal yang bersaing (competitive proposal) antara kelompok-kelompok masyarakat, Dewan-dewan sub wilayah tersebut akan menerima pelatihan tambahan untuk mengelola dana tersebut.

Pencairan dana di semua 13 wilayah akan dilakukan menjelang akhir September tahun ini.

□ ***Sektor Swasta***

Sebuah Proyek Usaha Kecil dan Menengah senilai AS\$10 juta selama dua tahun melalui Dana Perwalian yang dikelola oleh Bank Dunia telah disetujui pada 11 April. Proyek ini akan memberikan pinjaman kepada pebisnis Timor Timur untuk membantu menggairahkan sektor swasta negeri ini.

Proyek tersebut akan memberikan pinjaman mulai dari AS\$500 hingga AS\$50.000 kepada warga Timor Timur yang mempunyai rencana bisnis yang praktis dan menarik. Gagasan bisnis dari semua sektor akan dipertimbangkan. Pemberian pinjaman ini difasilitasi dan dikelola oleh Portuguese Banco Ultramarino. Formulir permohonan dapat diambil di Kantor Administrasi Wilayah dan dapat diajukan di kantor tersebut atau di kantor BNU. Pinjaman diperkirakan akan dicairkan mulai akhir bulan April.

Lebih dari 1000 pengusaha telah mendaftarkan diri pada Unit Pendaftaran UNTAET menjelang akhir April. Seratus dari pengusaha tersebut adalah pengusaha asing dan yang lainnya adalah pengusaha Timor Timur.

□ *Pertanian dan Perkebunan*

Suatu misi bersama yang dipimpin oleh Bank Dunia, USAID, Portugal, FAO dan UNTAET, telah meninjau suatu program rehabilitasi pertanian untuk tiga tahun mendatang. Biaya proyek ini diperkirakan mencapai AS\$25 juta. Program tersebut kemungkinan akan terdiri atas tiga komponen. Prioritas akan diberikan kepada pemulihan aset-aset produktif seperti bibit, pupuk, ternak sapi dan unggas. Kedua, misi tersebut juga telah mengidentifikasi perlunya sistem irigasi yang lebih baik dan rehabilitasi jalan menuju lokasi pertanian, pasar desa, fasilitas penyimpanan dan tangki air. Ketiga, dana dibutuhkan untuk advis teknologi dan pusat servis untuk memajukan pembangunan pertanian.

Bantuan untuk upaya rehabilitasi pertanian berasal dari Norwegia yang telah menyumbang AS\$200.000 bagi pengadaan 1000 ton pupuk dan biaya yang berkaitan dengan proyek. Kiriman pupuk tersebut akan tiba di Timor Timur awal Mei dan akan didistribusikan ke semua wilayah dengan bantuan WFP.

Pada 4 April UNTAET telah memulai kursus pelatihan selama sebulan mengenai kesehatan hewan dan pengembangbiakan ternak untuk 21 teknisi ternak Timor Timur.

Spesialis FAO dalam bidang perikanan skala kecil menemukan bahwa upaya untuk merehabilitasi industri perikanan pantai skala kecil hendaknya terpusat pada penangkapan ikan laut dalam karena hal ini tidak akan mengarah kepada penangkapan secara berlebih-lebihan dalam waktu dekat ini oleh perusahaan perikanan setempat yang berskala kecil.

Para ahli FAO tersebut juga mengidentifikasi beberapa bidang yang memerlukan pendanaan segera, seperti untuk keperluan perbaikan kapal dan perahu ikan,

pengadaan fasilitas pembuatan es, pengadaan lemari es dan alat penangkapan ikan juga pemanfaatan garam sebagai cara untuk mengawetkan ikan di daerah pedesaan.

PENEGAKAN HUKUM

□ *Hakim*

Sebanyak 12 hakim dan jaksa baru Timor Timur telah diambil sumpahnya pada 6 April lalu oleh Administrator Transisional di Pengadilan Wilayah (District Court) di Dili. Keenam orang hakim, dua hakim penyelidik (investigating magistrates) dan empat jaksa, diangkat menyusul rekomendasi oleh Komisi Dinas Peradilan Transisional yang dikepalai oleh Uskup Basilio do Nascimento.

Ini adalah kelompok kedua hakim dan jaksa Timor Timur yang diangkat untuk ditugaskan di pengadilan setelah kelompok pertama sebanyak 12 orang yang diangkat pada Januari lalu. Seorang hakim dan seorang jaksa akan memangku jabatan di Pengadilan Wilayah di Oecusi sementara sepuluh hakim dan jaksa lainnya telah ditugaskan ke Pengadilan Wilayah Baucau. Pada tahap permulaan, mereka akan bertugas di Pengadilan Dili menunggu selesainya renovasi gedung Pengadilan Baucau dan fasilitas penahanannya.

Urusan Departemen Urusan Peradilan UNTAET telah mempekerjakan delapan hakim profesional untuk bertindak sebagai mentor bagi hakim Timor-Timur yang baru dilantik tersebut. Peradilan Timor Timur menerapkan hukum Indonesia (sejauh tidak bertentangan dengan konvensi hak asasi internasional dan peraturan UNTAET) yang didasarkan pada sistem hukum sipil. Hakim yang dipekerjakan oleh UNTAET tersebut adalah pakar-pakar hukum internasional dari negara-negara yang menerapkan sistem hukum sipil yang sama.

Sebuah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding - MOU) mengenai kerjasama dalam bidang hukum, peradilan dan hak asasi manusia telah ditandatangani dalam minggu pertama bulan April antara

UNTAET dan Indonesia. (*perhatikan Hak Asasi Manusia*)

□ *Polisi Sipil*

Pada akhir April jumlah polisi sipil di Timor Timur mencapai lebih dari 1100 orang. Duabelas diantara mereka adalah polisi dari Bosnia dan Herzegovina yang tiba pada 19 April. Ini merupakan kali pertama polisi Serbia, Kroasia dan Bosnia bertugas bersama di bawah bendera Bosnia sejak berakhirnya perang di negeri itu pada November 1995.

Polisi Sipil UNTAET mendirikan Unit Orang Rentan (*Vulnerable Persons Unit*) untuk menangani tindak kriminal terhadap wanita, anak-anak, orang lanjut usia, dan kelompok politik dan agama minoritas. Unit tersebut terdiri atas dua orang wanita dan tiga perwira lelaki dan sejauh ini telah menangani kasus-kasus serangan seksual dan kekerasan rumah tangga. Unit tersebut bekerjasama erat dengan kelompok-kelompok wanita selaku mitra-mitra konseling. Salah satu prakarsa yang diambil oleh unit tersebut adalah menyediakan fasilitas yang aman bagi korban kekerasan rumah tangga.

Tugas Polisi Timor Timur

Akademi Pelatihan Kepolisian Timor Timur telah dibuka di Dili pada 27 Maret dengan angkatan kadet pertama sebanyak 50 orang. Pelatihan di akademi ini akan berlangsung selama tiga bulan diikuti pelatihan sambil kerja selama tiga bulan lagi. Para calon polisi tersebut akan mendapatkan pelatihan mengenai konsep hak asasi manusia, dasar hukum kriminal, teknik kepolisian, peraturan lalu lintas, teknik penyelidikan dan keterampilan memandu mobil.

Angkatan kadet berikutnya akan memulai pelatihan pada bulan Juli.

Rekrutmen untuk Dinas Kepolisian Timor Timur adalah proses yang terus berjalan dan akan mengambil waktu tiga tahun untuk merekrut 3000 polisi.

□ *Kelompok Bantuan Polisi*

Sebanyak 37 warga Timor Timur anggota Kelompok Bantuan Polisi telah ditugaskan di seluruh Timor Timur pada 17 April untuk bertugas bersama polisi sipil. Sebanyak 50 mantan polisi Timor Timur diharapkan akan bergabung dengan program tersebut. Anggota kelompok ini tidak berwenang untuk melakukan penangkapan tetapi memberikan bantuan dan saran kepada Polisi Sipil mengenai aspek-aspek struktur masyarakat dan kebudayaan setempat yang relevan dengan penegakan hukum dan ketertiban, dan intelijen mengenai pola perilaku kriminal. Mereka mengenakan topi biru PBB dan nantinya akan mengenakan baju polo berwarna biru PBB dengan tulisan "UN Police Assistance Group" tertulis pada bagian belakang dengan logo PBB serta tulisan "Police Assistance Group" di sebelah kiri dada.

□ *Sistem Penjara*

Pada pertengahan April, UNTAET mulai merenovasi fasilitas penjara Becora di Dili. Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB bersama dengan Pelayanan Manajemen Bangunan UNTAET sedang melaksanakan renovasi tersebut di satu bagian penjara tersebut. Pekerjaan renovasi itu selesai menjelang akhir bulan April dan penjara tersebut bisa beroperasi kembali pada permulaan Mei. Renovasi tiga blok sel dan beberapa bangunan administrasi akan menyediakan tempat untuk sekitar 100 tahanan. Fasilitas penjara tersebut kelak akan dapat menampung sekitar 250 tahanan. Renovasi fasilitas penjara Gleno juga mendekati penyelesaian dan fasilitas ini akan dapat menampung sekitar 120 tahanan. Pekerjaan renovasi ini dibiayai oleh Pemerintah Inggris.

Sebagai tindak lanjut dari misi kunjungan dua pakar tahanan dari Selandia Baru bulan lalu, pemerintah Selandia Baru telah mengirimkan 10 orang petugas penjara dan dua orang manajer untuk membantu mengoperasikan fasilitas penjara di Timor Timur dan melatih staf Timor Timur. Rekrutmen staf penjara Timor Timur telah dimulai.

Sebuah Nota Kesepahaman (MOU) mengenai kerjasama dalam bidang hukum, peradilan dan hak asasi manusia antara UNTAET dan Indonesia telah ditandatangani pada 6 April. MOU ini akan memfasilitasi upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di Timor Timur tahun lalu.

Dengan persetujuan tersebut, UNTAET dan Indonesia berjanji untuk menghadirkan mereka yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyelidikan, memastikan bahwa dokumen peradilan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, dan melaksanakan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan. Kedua pihak juga sepakat untuk memfasilitasi perpindahan warga masyarakat dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain, mengizinkan pakar forensik untuk mengambil bagian dalam kegiatan penggalian kembali mayat-mayat, menjamin bahwa wakil dari berbagai otorita dapat menyertai sidang-sidang dan memberikan informasi, bukti dan dokumen yang relevan.

Sementara itu, penggalian kembali mayat korban kekerasan bulan September lalu terus berlanjut. Menjelang pertengahan April, lebih dari 300 mayat telah ditemukan di seluruh Timor Timur dan dari jumlah ini 160 mayat telah digali kembali oleh pakar forensik Hak Asasi Manusia PBB dan polisi sipil. Setelah digali kembali, mayat tersebut dibawa ke Kamar Mayat Hak Asasi Manusia di Dili untuk diotopsi dan bila teridentifikasi dengan pasti dikembalikan kepada keluarga mereka. Ratusan lokasi pemakaman akan digali kembali setelah akhir musim hujan ini.

Di Pasabe saja, sebanyak 20 mayat telah digali kembali pada awal April, setelah 46 mayat dan sisa-sisa tubuh manusia digali kembali pada bulan Februari. Diperkirakan bahwa setidaknya 75 orang meninggal dalam periode waktu yang disebut sebagai "Pembantaian Passabe" September lalu.

❑ *Situasi Keamanan*

Timor Timur adalah tempat yang damai dan aman, menurut evaluasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penugasan satu batalion tambahan TNI di bagian Timor Barat daerah perbatasan diperkirakan akan meningkatkan keamanan dengan dampak yang positif di daerah perbatasan tersebut.

Dalam minggu pertama bulan April terjadi kasus patroli TNI yang berjalan kaki yang melewati perbatasan dan empat kasus helikopter UNTAET yang memasuki wilayah udara Timor Barat. Telah disepakati oleh masing-masing komando bahwa kasus-kasus seperti ini hendaknya diselesaikan pada tingkat taktis oleh komandan sektor. Brigadir Duncan Lewis, Komandan Sektor Barat yang berbatasan dengan Timor Barat, mengatakan "kesalahan navigasi yang tidak disengaja bisa dan dapat terjadi dari waktu ke waktu, baik Komandan TNI dan Komandan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian mengerti itu dan keduanya melaksanakan rezim kendali untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan ini."

Enam anak kecil tewas dalam minggu terakhir bulan Maret dalam dua kecelakaan tragis setelah mereka menemukan alat ledak beramunisi yang tidak meledak yang meledak saat mereka bermain dengan benda tersebut. Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB menganggap bahwa tidak ada bahaya luar biasa dari alat ledak beramunisi yang tidak meledak di Timor Timur itu, tetapi menyarankan agar anak-anak dan remaja diperingatkan akan bahaya yang potensial tersebut. Kantor Komunikasi dan Informasi Umum Australia telah membuat poster untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan apa yang harus dilakukan bila menemukan alat ledak beramunisi yang tidak meledak. Poster tersebut akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Timor Timur dalam bulan Mei.

✓ **MOU Mengenai Masalah Perbatasan**
Komandan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Letjen Jaime

de los Santos dan Komandan TNI di Timor Barat, Mayjen Kiki Syahnakri, pada tanggal 11 April telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding -MOU) mengenai masalah perbatasan yang menyangkut keamanan, lalu lintas perbatasan, kepulauan pengungsi, bantuan kemanusiaan dan berbagai hal lainnya yang menjadi keprihatinan kedua belah pihak.

Dokumen itu disebut Nota Kesepahaman untuk Koordinasi Taktis di Daerah Perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (Timor Barat) dan Timor Timur antara TNI dan Komponen Militer UNTAET. MOU tersebut terdiri atas 12 pasal, dan tujuannya adalah untuk memfasilitasi kerjasama yang erat antara kedua pihak "untuk mengendalikan insiden yang mungkin terjadi dan untuk membantu kepulauan pengungsi".

MOU tersebut menetapkan perbatasan tetapi hanya untuk tujuan koordinasi taktis militer; perbatasan itu bukan perbatasan yang diakui secara internasional antara Timor Timur dan Timor Barat.

Berdasarkan MOU tersebut, Pengamat-Pengamat Militer PBB akan ditempatkan di 12 persimpangan yang disetujui dan mereka akan bertugas sebagai Perwira Penghubung. Mereka akan melakukan koordinasi antara TNI dan Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bila kedua pihak ingin mengadakan dialog satu sama lain.

MOU ini mengkonfirmasi memorandum sebelumnya yang ditandatangani pada 12 Januari antara Interfet dan TNI, dan mencakup beberapa butir tambahan.

Sebagian dari butir-butir baru tersebut adalah: Persimpangan baru di Memo, wilayah Maliana; Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB atau TNI tidak boleh membawa senjata bila menyeberangi perbatasan; dan kedua belah pihak akan bekerjasama dalam memberikan laporan dan dalam melakukan penyelidikan insiden-insiden di daerah perbatasan.

DANA KERPERCAYAAN

❑ ***Dana Kepercayaan UNTAET***

Menteri Kerjasama Pembangunan Swedia telah menandatangani suatu persetujuan pada tanggal 6 April dengan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Dili yang telah menambah hampir AS\$ 5 juta kepada Dana Perwalian UNTAET. Dengan perkembangan ini, sumbangan total Swedia kepada Dana Perwalian UNTAET mencapai hampir AS\$ 6 juta untuk tiga tahun dari komitmen sebelumnya sebesar AS\$ 1 juta dalam Konferensi Tokyo pada Desember 1999.

Dari jumlah AS\$ 32 juta yang dijanjikan negara donor untuk Dana Perwalian UNTAET pada Konferensi Tokyo tersebut, sebanyak AS\$ 23 juta baru disumbangkan pada akhir bulan April.

❑ ***Berbagai Dana Kepercayaan Bank Dunia***

Negara-negara donor telah menjanjikan AS\$ 146,9 juta kepada Dana Perwalian untuk Timor Timur yang dikelola Bank Dunia.

Beberapa donor menjanjikan sumbangan terhadap dana tersebut selama tiga tahun dan akan mencicil sumbangan mereka. Hingga 15 April 2000 Dana Perwalian untuk Timor Timur telah menerima AS\$ 24 juta termasuk AS\$ 11 juta dari dana Bank Dunia sendiri dan AS\$ 13 juta dari negara-negara donor seperti Australia, Portugal dan Jepang.